



Article Informations
Corresponding Email:
sekarayyu80@gmail.com

Received: 16/08/2024; Accepted:
27/02/2025; Published: 27/02/2025

DETERMINASI AMERIKA SERIKAT MELALUI KETERLIBATANNYA DALAM KONFLIK SURIAH TAHUN 2017- 2021

Sekar Ayu Budiarsih

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Konflik Suriah yang telah berlangsung selama lebih dari satu dekade menjadi salah satu krisis kemanusiaan dan geopolitik terbesar di abad ke-21. Keterlibatan berbagai kekuatan global, termasuk Amerika Serikat, semakin memperumit situasi di kawasan tersebut. Didasarkan pada teori realisme offensif, penelitian ini bertujuan untuk meneliti bentuk determinasi Amerika Serikat melalui keterlibatannya dalam konflik Suriah sebagai sarana untuk mengejar supremasi kekuasaan dan keamanan di kawasan Timur Tengah. Untuk menjelaskan bentuk determinasi Amerika Serikat tersebut penelitian ini menggunakan konsep *hard power* yang mencakup kekuatan militer, kekuatan ekonomi, dan pembentukan aliansi. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik Suriah bukan semata-mata bertujuan untuk mengakhiri krisis kemanusiaan, melainkan untuk mempertahankan kepentingan strategisnya di kawasan tersebut, termasuk memperkuat pengaruh geopolitiknya. Dengan menggunakan *hard power*, Amerika Serikat tidak hanya mengandalkan kekuatan militer tetapi juga memanfaatkan kekuatan ekonomi dan pembentukan aliansi sebagai sarana untuk mempertahankan dominasinya di Timur Tengah dan mengancam kepentingan nasionalnya.

Kata Kunci: Determinasi Amerika Serikat, *Hard Power*, Konflik internal Suriah.

Abstract

The decade-long Syrian conflict has become one of the biggest humanitarian and geopolitical crises of the 21st century. The involvement of various global powers, including the United States, further complicates the situation in the region. Based on the theory of offensive realism, this study aims to examine the form of US determination through its involvement in the Syrian conflict as a means to pursue power and security supremacy in the Middle East region. To explain the form of US determination, this research uses the concept of hard power which includes military power, economic power, and alliance

formation. This research was compiled using descriptive qualitative methods. The results show that the involvement of the United States in the Syrian conflict is not solely aimed at ending the humanitarian crisis, but to maintain its strategic interests in the region, including strengthening its geopolitical influence. By using hard power, the United States not only relies on military power but also utilizes economic power and alliance formation as a means to maintain its dominance in the Middle East and secure its national interests. This research will further discuss the forms of hard power implemented by the United States in the Syrian conflict.

Keywords: *US Determination, Hard Power, Internal Syrian Conflict*

1. PENDAHULUAN

Pada awal masa pemerintahan Donald Trump tepatnya pada tahun 2017, Amerika Serikat telah terlibat dalam konflik Suriah Sejak tahun 2011, ketika demonstrasi masa di Damaskus meminta perubahan sistem politik dan ekonomi Suriah. Namun, Amerika Serikat secara aktif terlibat dalam konflik Suriah sejak tahun 2013. Konflik Suriah pada awalnya merupakan perang saudara antar pemerintah yaitu rezim Bashar Al-Assad dengan kelompok oposisi pemerintah, yang berkeinginan untuk mengubah pergantian rezim secara demokratis (Ria Suhartini, 2022) Konflik tersebut merupakan pengaruh dari dinamika *Arab Spring* tepatnya pada penghujung tahun 2010 berupa revolusi yang dilakukan oleh rakyat untuk menggulingkan pemerintahan otoriter di wilayah tersebut. Dalam beberapa contoh kasus yang terjadi di beberapa negara Timur Tengah, seperti di Tunisia dan Mesir, revolusi rakyat yang menuntut sistem baru tersebut berhasil di negara tersebut, akan tetapi tidak berhasil di beberapa negara lain salah satunya Suriah (A Muchaddam Fahham, 2024).

Ketidakberhasilan upaya rakyat Suriah dalam mencapai keinginannya, memicu terjadinya konflik dengan pemerintah. Selama terjadinya konflik bersenjata antara rezim Bashar Al-Assad maupun kelompok oposisi pemerintah, keduanya berusaha mendapatkan dukungan internasional untuk mendapatkan pengakuan dan legitimasi. Kedua kubu tersebut pada akhirnya berhasil mendapatkan respon

internasional. Sebagian pihak ada yang mendukung kubu rezim Bashar Al-Assad, sebagian lagi mendukung kelompok oposisi (Muhammad Syaroni Rofii, 2019). Dengan adanya keterlibatan banyak peran internasional dan non-negara dalam konflik internal Suriah membuat konflik ini semakin rumit dan memperpanjang krisis. Adanya kepentingan yang beragam dari negara-negara terlibat, baik dalam mempertahankan sekutu mereka, melindungi keamanan nasional, atau memajukan agenda geopolitik, membuat penyelesaian damai semakin sulit dicapai. Dalam hal ini, Suriah menjadi medan pertempuran baik bagi kepentingan regional maupun global, termasuk persaingan Amerika Serikat, Rusia, Iran, dan Turki (Syarif Baharudin, 2019).

Motif Amerika Serikat dibalik keterlibatannya pada konflik internal Suriah salah satunya untuk melindungi dan mempertahankan eksistensi sekutu regional nya, yakni Israel (Haydar Yusuf, 2020). Dalam keterlibatannya di konflik internal Suriah, Amerika Serikat berperan sebagai pendukung demonstran atau oposisi yang menentang kepemimpinan Bashar Al-Assad. Alasan mengapa Amerika mendukung kelompok oposisi dan menginginkan kejatuhan rezim bashar Al-Assad dikarenakan hubungan dekat antara pemerintah Suriah dengan Hizbullah dan Hamas sangat mengancam keamanan Israel. Kelompok militan Lebanon, Hizbullah, menentang keras kebijakan Israel di wilayah tersebut. Kedua kelompok tersebut memiliki hubungan erat dengan pemerintah Suriah. Israel, yang merupakan sekutu terpenting Amerika Serikat di Timur Tengah, khawatir dengan kedekatan ini. Jika Bashar Assad jatuh, posisi Israel akan semakin kuat. Sejak berdirinya Negara Zionis pada tahun 1948, Amerika Serikat telah mendasarkan kebijakan Timur Tengahnya pada komitmen terhadap keamanan dan kesejahteraan Israel. Selain karena ingin melindungi sekutu regionalnya, keterlibatan Amerika Serikat di konflik Suriah juga dilakukan guna untuk menahan pengaruh Iran dan Rusia (Andhika Bayu, 2021). Posisi strategis Suriah dari segi geopolitik membuat AS memiliki beragam kepentingan, seperti

menjaga stabilitas regional. Sebagai negara hegemon di Timur Tengah, konflik Suriah yang melibatkan Rusia dan Iran sebagai rival AS di arena internasional menjadi ancaman bagi status AS sebagai negara adidaya. Rusia merupakan sekutu lama Suriah, tentunya dengan kehadiran Rusia dapat memperkuat posisi Bashar Al-Assad dan menantang dominasi Amerika Serikat pada kawasan tersebut. Dalam hal ini juga Iran mendukung Bashar Al-Assad melalui milisi seperti Hizbullah, dimana mereka ingin meningkatkan pengaruh Iran di Suriah dan memperluas pengaruhnya di Timur Tengah. Pertempuran antara militer Amerika Serikat dan militer Rusia menunjukkan kehebatan dan kekuatan dari kedua pasukan tersebut. Selain Amerika Serikat, Inggris dan Perancis juga turut membantu Amerika Serikat dalam melawan serangan senjata kimia yang dilakukan oleh Bashar al-Assad. Di sisi lain, Bashar al-Assad dan militer Rusia melakukan perlawanan terhadap militer Amerika Serikat serta sekutu mereka, Inggris dan Perancis, dengan kekuatan militer yang mereka miliki (Illan Goldenberg, 2018). Persaingan sengit antara Amerika Serikat dan Iran-Rusia sangat terlihat dalam keterlibatan mereka dalam konflik Suriah.

Kemudian kemunculan ISIS yang menyebabkan ketidakstabilan di kawasan menjadi ancaman bagi AS, memicu Amerika Serikat untuk melakukan serangan langsung terhadap ISIS. Hal ini yang menjadi alasan lain Amerika terlibat dalam konflik Suriah. Serangan ISIS terhadap *Free Syrian Army* di Raqqa menjadi ancaman bagi AS di Suriah di mana FSA dianggap sebagai perpanjangan tangan AS dalam perebutan kepentingan di Suriah. Situasi ini mendorong Amerika Serikat untuk melancarkan serangan langsung dengan dua tujuan: menjaga status sebagai kekuatan besar yang membawa stabilitas di Timur Tengah dan dunia, serta melindungi kepentingan AS di Raqqa melalui FSA yang terancam oleh serangan ISIS (Muhammad Maharani, 2019).

Selain tujuan geopolitik, kepentingan ekonomi juga menjadi salah satu motif keterlibatan Amerika Serikat pada konflik internal Suriah.

Kawasan Timur Tengah yang kaya akan minyak dan gas dianggap memiliki posisi strategis bagi Amerika Serikat dalam meningkatkan kegiatan industri dan perekonomian Barat sejak Perang Dunia II. Pasokan minyak dari wilayah Timur Tengah menjadi faktor krusial bagi stabilitas ekonomi Amerika Serikat dan sekutunya. Suriah berada di jalur perdagangan dunia, yaitu Laut Mediterania (Syuryansyah, 2023). Karena Laut Mediterania merupakan jalur strategis perdagangan yang banyak diminati oleh aktor global, menguasai Suriah menjadi penting untuk mengendalikan wilayah tersebut. Oleh karena itu, Amerika Serikat akan terus memperkuat pengaruhnya di Suriah.

Terlepas dari segala bentuk-bentuk kepentingan yang mendasari kebijakan Amerika Serikat untuk terlibat dalam konflik Suriah, peran Amerika Serikat dalam konflik Suriah menjadi menarik untuk diteliti dalam menjawab bentuk dari determinasi yang diimplementasikan Amerika Serikat melalui keterlibatannya dalam konflik Suriah guna untuk mengamankan kepentingannya tersebut di Suriah. Pengertian determinasi sendiri dalam hubungan internasional merujuk pada tekad dan kesungguhan sebuah negara untuk mencapai tujuan atau kepentingan nasionalnya di dalam lingkungan global yang kompetitif dan sering kali penuh konflik. Determinasi sering kali mencerminkan komitmen strategis sebuah negara dalam menghadapi tantangan, ancaman, atau situasi yang memerlukan keputusan penting. Selai itu, seiring dengan pergantian kepemimpinan di AS, tentu Amerika Serikat mempunyai kebijakan baru dalam merespon konflik di Suriah. Didasari pada pemikiran tersebut, maka peneliti akan mengangkat judul penelitian sebagai berikut: ***“Determinasi Amerika Serikat Melalui Keterlibatannya dalam Konflik Suriah Tahun 2017-2021”***

2. PEMBAHASAN

DETERMINASI AMERIKA SERIKAT MELALUI KETERLIBATANNYA DALAM KONFLIK SURIAH TAHUN 2017-2021

Dalam dunia internasional, negara-negara besar seperti Amerika Serikat tidak hanya berusaha untuk mempertahankan *status quo* tetapi juga cenderung bertindak agresif untuk meningkatkan kekuasaan dan pengaruh mereka. Dalam konflik Suriah, Amerika Serikat telah menggunakan pendekatan ofensif untuk menantang kekuatan-kekuatan lain seperti Rusia dan Iran, yang mendukung rezim Assad. Dengan melemahkan rezim Assad dan mengurangi pengaruh Rusia dan Iran, Amerika Serikat berupaya untuk memperkuat posisinya sendiri di kawasan yang strategis ini. Dengan begitu, untuk mencapai kepentingan nasional Amerika Serikat di Suriah, Amerika Serikat melakukan berbagai macam upaya dengan menggunakan kekuatan militer atau hard power sebagai bentuk dari determinasi Amerika Serikat.

Kekuatan Militer

Richard K. Betts, dalam bukunya "*American Force: Dangers, Delusions, and Dilemmas in National Security*," menyebutkan bahwa determinasi dalam menggunakan hard power sering kali muncul dalam konteks di mana negara merasa terancam atau di mana kepentingan vitalnya dipertaruhkan. Dalam hal ini, keputusan untuk menggunakan hard power bukan hanya soal strategi, tetapi juga cerminan dari determinasi yang kuat untuk melindungi keamanan dan kepentingan nasional (Richard K. Betts, 2012). Sebagai determinasi, *hard power* mencerminkan tekad suatu negara untuk mempertahankan atau mencapai tujuan meskipun menghadapi hambatan atau tantangan. Konsep hard power, yang diperkenalkan oleh Joseph Nye, merujuk pada penggunaan kekuatan militer, kekuatan ekonomi dan pembentukan aliansi untuk mempengaruhi perilaku negara atau aktor lain guna untuk

mencapai kepentingan nasionalnya. Dalam bukunya *"The Future of Power,"* Nye menyebutkan bahwa negara-negara sering mengandalkan *hard power* sebagai cara untuk mengamankan kepentingan nasional mereka dalam situasi di mana cara-cara diplomatik atau persuasi tidak efektif (Nye, 2004).

Dalam konflik internal Suriah, Amerika Serikat telah menerapkan berbagai bentuk penggunaan *hard power*, dalam kekuatan militer diantaranya termasuk intervensi militer, memberikan bantuan senjata dan pelatihan militer kepada kelompok oposisi, hal tersebut dilakukan guna untuk mencapai tujuannya dalam menghadapi kelompok teroris ISIS, mencegah pengaruh Rusia dan Iran di Suriah, dan menekan rezim Bashar al-Assad. Pada awalnya Amerika Serikat, bersama dengan sekutu-sekutunya, awalnya memberikan dukungan non-militer kepada oposisi Suriah melalui sanksi ekonomi terhadap rezim Assad dan bantuan kemanusiaan kepada warga Suriah yang terdampak konflik. Namun, munculnya ISIS pada tahun 2014 mengubah dinamika konflik dan memaksa Amerika Serikat untuk terlibat langsung secara militer (Trimulya, 2021).

Pada Agustus 2014, setelah ISIS berhasil menguasai wilayah yang luas di Irak dan Suriah, Amerika Serikat meluncurkan kampanye militer yang disebut *"Operation Inherent Resolve"* untuk menghancurkan kekhalifahan ISIS. Serangan udara pertama dilakukan di Irak, dan pada September 2014, operasi ini diperluas ke Suriah. Tujuan utama dari *Operasi Inherent Resolve* adalah untuk menghancurkan kemampuan militer ISIS, melemahkan infrastrukturnya, dan mendukung pasukan lokal yang memerangi kelompok teroris tersebut. Koalisi internasional yang dipimpin AS bekerja sama dengan berbagai aktor lokal, termasuk *Kurdish People's Protection Units (YPG)* dan *Syrian Democratic Forces (SDF)*, yang menjadi mitra utama di lapangan (Trimulya, 2021).

Pada tahun 2015, Rusia memulai intervensi militernya sendiri untuk mendukung rezim Assad, yang memperumit situasi di lapangan. Meskipun demikian, koalisi yang dipimpin AS berhasil merebut kembali sejumlah kota penting dari ISIS, termasuk Manbij, Raqqa, dan Deir ez-Zor. Ketika Donald Trump menjadi Presiden AS pada tahun 2017, ada perubahan dalam strategi AS di Suriah. Trump berjanji untuk menghancurkan ISIS secara lebih agresif dan mengurangi keterlibatan AS dalam konflik Suriah. Fokus utama tetap pada penghancuran ISIS, tetapi ada juga keputusan untuk menarik sebagian besar pasukan AS dari Suriah. Pada akhir 2018, Trump mengumumkan bahwa ISIS telah dikalahkan dan menyatakan niatnya untuk menarik semua pasukan AS dari Suriah. Namun, penarikan ini tidak sepenuhnya dilaksanakan, dan sejumlah kecil pasukan AS tetap berada di Suriah untuk melanjutkan operasi melawan sisa-sisa ISIS dan melindungi ladang minyak. Intervensi militer Amerika Serikat di Suriah menyoroiti kompleksitas kebijakan luar negeri di kawasan yang bergejolak (Soebroto, 2019). Meskipun berhasil mengurangi ancaman ISIS, konflik yang lebih luas tetap belum terselesaikan, dengan jutaan pengungsi dan korban jiwa sebagai akibatnya. Intervensi ini juga menyoroiti dilema moral dan strategis yang dihadapi negara-negara besar dalam menangani konflik internasional.

Penggunaan kekuatan militer sebagai bentuk determinasi Amerika Serikat dalam konflik Suriah yang selanjutnya, yaitu dengan melakukan pemberian senjata dan pelatihan militer terhadap kelompok oposisi. Sejak awal konflik, Amerika Serikat telah mengambil sikap tegas terhadap rezim Assad, mengutuk tindakan kekerasan terhadap warga sipil dan menyerukan transisi politik. Sebagai bagian dari upaya internasional untuk mendukung oposisi dan melemahkan posisi Assad, AS mulai memberikan berbagai bentuk bantuan kepada kelompok-kelompok yang berjuang melawan pemerintah Suriah (Kusmin, 2023).

Salah satu program utama yang diluncurkan oleh AS adalah program pelatihan dan perlengkapan (*train and equip program*) yang

dimulai pada tahun 2014. Program ini bertujuan untuk melatih dan melengkapi pejuang oposisi Suriah yang berkomitmen untuk memerangi kelompok teroris seperti ISIS dan al-Qaeda, serta rezim Assad. Melalui program ini, ribuan pejuang oposisi dilatih oleh pasukan khusus AS di pangkalan-pangkalan di Yordania dan Turki. Meskipun program ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah dalam menyeleksi pejuang yang "*moderate*" dan memastikan bahwa perlengkapan tidak jatuh ke tangan kelompok ekstremis, program ini tetap menjadi komponen penting dari strategi AS di Suriah. Menurut laporan dari Departemen Pertahanan AS, hingga akhir tahun 2016, lebih dari \$500 juta telah dialokasikan untuk program ini (Laode, 2018).

Pada masa Donald Trump menjabat sebagai Presiden AS pada 2018, ada perubahan dalam pendekatan AS terhadap konflik Suriah. Fokus utama pemerintahan Trump adalah menghancurkan ISIS, dan upaya untuk menggulingkan Assad menjadi kurang prioritas. Pada tahun 2018, Trump memerintahkan penghentian program pelatihan dan perlengkapan CIA yang mendukung pejuang oposisi Suriah, mengutip efektivitas yang rendah dan risiko bahwa senjata dapat jatuh ke tangan kelompok ekstremis. Namun, AS tetap melanjutkan operasi militernya di Suriah, terutama melalui serangan udara dan dukungan kepada Pasukan Demokratik Suriah (SDF), yang didominasi oleh pejuang Kurdi. Bantuan finansial kepada kelompok-kelompok oposisi non-Kurdi berkurang secara signifikan, dan fokus beralih ke stabilisasi wilayah-wilayah yang telah dibebaskan dari ISIS (Soebroto, 2019).

Dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas, penggunaan kekuatan militer sebagai bentuk *hard power* oleh Amerika Serikat dalam konflik Suriah merupakan salah satu instrumen utama untuk mencapai tujuan strategis di Timur Tengah. *Hard power*, seperti yang dijelaskan oleh Joseph Nye, mengacu pada penggunaan kekuatan militer untuk memaksa pihak lain sesuai dengan kepentingan sebuah negara. Dalam konteks Suriah, Amerika Serikat secara langsung menggunakan militer

untuk menghancurkan kelompok teroris seperti ISIS, serta untuk membatasi pengaruh Iran dan Rusia yang mendukung rezim Bashar al-Assad. Serangan udara, serangan rudal, serta pengiriman pasukan khusus menjadi alat utama Amerika Serikat dalam menjalankan kebijakan hard power ini. Secara keseluruhan, penggunaan kekuatan militer oleh Amerika Serikat di Suriah menunjukkan efektivitas dalam jangka pendek, seperti melemahkan ISIS, tetapi gagal mencapai stabilitas politik yang lebih luas dan perubahan rezim yang diinginkan. Kekuatan militer terbukti efektif dalam menghadapi ancaman teroris, tetapi terbatas dalam menangani konflik yang kompleks dengan aktor-aktor negara kuat lainnya. Sebagai hasilnya, determinasi Amerika Serikat dalam menggunakan kekuatan militer di Suriah hanya berhasil secara parsial, dan tidak mampu menciptakan solusi jangka panjang yang diinginkan.

Kekuatan Ekonomi

Joseph Nye, yang terkenal dengan konsep "*soft power*" dan "*hard power*", menyatakan bahwa "*hard power* bekerja melalui paksaan, ancaman, atau insentif material, termasuk kekuatan ekonomi yang dapat digunakan sebagai alat diplomatik untuk menekan negara lain" (Nye, 2004). Dalam konteks ini, kekuatan ekonomi menjadi salah satu senjata utama dalam hubungan internasional yang digunakan untuk memengaruhi perilaku negara lain atau kelompok aktor non-negara. Joseph Nye menyebutkan bahwa kekuatan ekonomi, yang merupakan bagian dari hard power, dapat digunakan untuk memaksakan kehendak negara melalui "penghargaan" dan "hukuman" ekonomi, seperti bantuan finansial atau sanksi (Nye, 2004). Dalam konteks ini, negara-negara besar sering menggunakan ekonomi sebagai senjata untuk memaksakan kepentingannya di panggung global.

Dalam konflik Suriah Amerika Serikat juga melakukan pemberian sanksi ekonomi kepada aktor yang mendukung rezim Bashar Al-Assad

dengan membuat undang-undang *Caesar Syria Civilian Protection Act*, atau *Caesar Act*, adalah undang-undang yang disahkan oleh Kongres Amerika Serikat pada bulan Desember 2019. Undang-undang ini bertujuan untuk menekan rezim Bashar al-Assad di Suriah dengan cara memberlakukan sanksi ekonomi dan keuangan, serta mendukung upaya perlindungan masyarakat sipil dan keadilan (Eliot, 2019). *Caesar Act* diimplementasikan oleh Departemen Luar Negeri dan Departemen Keuangan AS, yang bertanggung jawab untuk menegakkan sanksi dan menilai entitas yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah AS juga bekerja sama dengan sekutu dan mitra internasional untuk memastikan bahwa sanksi diterapkan secara efektif dan bahwa upaya kemanusiaan didukung (*Caesar Syria Civilian Protection Act - United States Department of State, 2021*).

Secara keseluruhan, penggunaan kekuatan ekonomi oleh Amerika Serikat dalam konflik Suriah sebagai bentuk determinasi *hard power* menunjukkan beberapa keberhasilan dalam menghancurkan ekonomi negara tersebut. Namun, ketidakmampuan untuk memaksakan perubahan politik yang diinginkan dan perlawanan dari kekuatan eksternal seperti Rusia dan Iran menunjukkan bahwa determinasi ini belum sepenuhnya efektif. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa Amerika Serikat gagal mencapai tujuan maksimumnya, meskipun berhasil menekan ekonomi Suriah, namun tidak berhasil mengubah dinamika politik Suriah secara keseluruhan. Rezim Assad tetap berkuasa, dan dukungan dari sekutu eksternal memperlemah upaya AS untuk menegakkan kontrol melalui sanksi ekonomi. Ini menegaskan bahwa meskipun kekuatan ekonomi dapat menjadi alat penting dalam kebijakan luar negeri, itu tidak selalu cukup untuk mencapai tujuan politik dalam konflik yang melibatkan aktor-aktor besar lainnya.

Pembentukan Aliansi

John Mearsheimer, seorang tokoh teori realisme ofensif, menjelaskan bahwa pembentukan aliansi sering kali didorong oleh keinginan negara-negara untuk mengimbangi kekuatan dominan atau mencegah munculnya kekuatan hegemon baru (Mearsheimer, 2001). Dalam hal ini, aliansi menjadi alat penting bagi negara-negara untuk memengaruhi dinamika politik global. Pembentukan aliansi menjadi salah satu manifestasi dari *hard power* karena memungkinkan negara untuk memperkuat posisi militer dan keamanan mereka dalam menghadapi ancaman eksternal, terutama melalui kekuatan gabungan dari negara-negara sekutu.

Salah satu aliansi utama yang dibentuk oleh Amerika Serikat adalah Koalisi Global untuk Memerangi ISIS, juga dikenal sebagai *Global Coalition to Defeat ISIS*. Koalisi ini didirikan pada tahun 2014 sebagai respons terhadap kemunculan kelompok teroris ISIS yang menguasai wilayah luas di Suriah dan Irak. Koalisi ini terdiri dari lebih dari 70 negara dan organisasi internasional, termasuk negara-negara seperti Inggris, Prancis, Jerman, Kanada, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Koalisi ini bekerja sama untuk melawan ISIS melalui serangan udara, dukungan logistik, dan pelatihan bagi pasukan lokal seperti Pasukan Demokratik Suriah (SDF). AS memimpin koordinasi serangan udara presisi yang menargetkan infrastruktur dan markas besar ISIS, menggunakan teknologi canggih untuk mengurangi dampak pada populasi sipil. Di samping itu, AS juga terlibat dalam Kelompok Dukungan Internasional untuk Suriah (ISSG), yang dibentuk untuk memfasilitasi proses perdamaian dan mencari solusi politik untuk konflik yang berkepanjangan ini. Kelompok ini terdiri dari negara-negara yang memiliki pengaruh di kawasan, termasuk anggota tetap Dewan Keamanan PBB, seperti AS, Rusia, China, Inggris, dan Prancis, serta negara-negara regional seperti Turki dan Iran. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam

dialog, kelompok ini bertujuan untuk mengurangi kekerasan dan menciptakan landasan bagi penyelesaian politik yang lebih stabil (State.gov, 2024). Satu lagi aliansi penting adalah Kelompok Inti Dukungan Suriah, yang juga dikenal sebagai *Friends of Syria*. Kelompok ini didirikan dengan tujuan untuk mendukung oposisi Suriah dan mempromosikan transisi politik dari rezim Assad menuju pemerintahan yang lebih demokratis. Terdiri dari sekitar 11 negara utama, termasuk AS, Inggris, Prancis, Jerman, Turki, dan negara-negara Teluk Arab, kelompok ini berfungsi sebagai platform untuk mengkoordinasikan bantuan finansial dan material kepada kelompok oposisi. Dukungan ini tidak hanya terbatas pada sumber daya militer, tetapi juga mencakup bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Suriah yang terjebak dalam konflik (Gov.uk, 2024).

Dari pemaparan diatas, pembentukan aliansi sebagai bentuk *hard power* merupakan salah satu determinasi utama Amerika Serikat dalam konflik Suriah untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Aliansi ini melibatkan negara-negara sekutu Amerika, baik di tingkat regional seperti negara-negara Teluk dan Israel, maupun di tingkat internasional, termasuk anggota NATO. Tujuan utama dari pembentukan aliansi ini adalah untuk menciptakan tekanan militer dan politik terhadap rezim Bashar al-Assad dan sekutunya, terutama Rusia dan Iran. Dalam konteks *hard power*, aliansi ini berfungsi sebagai kekuatan kolektif yang menggabungkan sumber daya militer dan diplomatik untuk menekan pihak-pihak yang bertentangan dengan kepentingan Amerika Serikat di Suriah. Namun, efektivitas determinasi Amerika Serikat melalui aliansi ini tidak sepenuhnya berhasil. Meskipun ISIS berhasil dihancurkan sebagai kekuatan besar di Suriah, rezim Bashar al-Assad tetap bertahan dengan dukungan signifikan dari Rusia dan Iran. Selain itu juga, ketidakselarasan kepentingan di antara sekutu-sekutunya membuat aliansi ini tidak sekuat yang diharapkan, dan hal ini melemahkan

determinasi *hard power* Amerika dalam konflik ini. Keberhasilan pendekatan ini bergantung pada kemampuan AS untuk terus menyesuaikan strategi dan membangun kerja sama yang efektif dengan berbagai aktor yang terlibat.

3. KESIMPULAN

Determinasi *hard power* yang digunakan Amerika Serikat dalam konflik Suriah selama masa pemerintahan Donald Trump sangat erat kaitannya dengan kepentingan strategis dan keamanan nasional AS. Trump menggunakan pendekatan *hard power* dalam kebijakan luar negerinya di Suriah, termasuk intervensi militer langsung melalui serangan udara terhadap rezim Bashar al-Assad pada 2017, serta melanjutkan operasi militer terhadap ISIS. Selain itu, Trump juga memperkuat sanksi ekonomi untuk menekan pemerintah Suriah dan sekutunya, terutama Iran dan Rusia, dan yang terakhir membentuk aliansi dengan negara-negara besar maupun non state dalam misi memberantas ISIS. Penggunaan kekuatan militer, kekuatan ekonomi, dan pembentukan aliansi ini bertujuan untuk memaksa perubahan perilaku lawan dan memperkuat pengaruh AS di wilayah strategis seperti Timur Tengah. Pendekatan Trump yang mengedepankan *hard power* di Suriah menggambarkan bagaimana AS memanfaatkan sumber daya kekuatannya secara langsung untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Tindakan AS di Suriah selama masa Trump mencerminkan strategi untuk memaksimalkan kekuasaan dan keamanan di bawah sistem internasional yang anarkis. Negara-negara besar seperti AS akan terus berusaha memperluas pengaruh mereka demi memastikan tidak ada kekuatan pesaing yang dapat mengancam mereka. Dalam konteks Suriah, Trump melihat intervensi AS sebagai upaya untuk mengekang pengaruh Iran dan Rusia, dua kekuatan yang mendukung Assad. Dengan demikian, kebijakan *hard power* AS di Suriah bukan hanya untuk

menjaga stabilitas regional tetapi juga untuk mencegah Rusia dan Iran memperluas dominasi mereka.

Secara keseluruhan, kebijakan Donald Trump di Suriah menegaskan determinasi AS untuk mencapai kepentingan nasionalnya dengan menggunakan kekuatan militer dan ekonomi yang kuat, juga dengan pembentukan aliansi sejalan dengan prinsip *hard power* dan realisme ofensif, yang menekankan pentingnya kekuatan fisik dan paksaan dalam menjaga dominasi global serta keamanan nasional. Namun, sejauh ini, efektivitas dari determinasi Amerika Serikat melalui keterlibatannya dalam konflik Suriah dapat dikategorikan sebagai kurang efektif. Meskipun Amerika Serikat berhasil mengurangi kekuatan ISIS, yang merupakan salah satu tujuan utama dari intervensinya, hasil keseluruhan tidak memenuhi harapan yang lebih luas.

Daftar Pustaka

- Akunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek Praktek. Rineka Cipta*. Vol. 2006. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002. <http://library.um.ac.id/free-contents/index.php/buku/detail/prosedur-penelitian-suatu-pendekatan-praktek-suharsimi-arikunto-19157.html>.
- Alhasni, Haydar Yusuf. "Kepentingan Amerika Serikat Dalam Konflik Suriah (2011-2013)," 2020
- "Caesar Syria Civilian Protection Act - United States Department of State." Accessed August 16, 2024. <https://2017-2021.state.gov/caesar-syria-civilian-protection-act/>.
- Colin H. Kahl, Ilan Goldenberg and Nicholas A. Heras. "A Strategy for Ending the Syrian Civil War." *Center for a New American Security* 53, no. 9 (2018): 1689–99.
- Fahham, A Muchaddam. "Mengkaji Konflik Suriah." *Aspirasi* 5, no. 1 (2014): 85–92.
- Fathun, Laode Muhamad. "Kebijakan Luar Negeri Obama Dalam Konflik Timur Tengah." *Jurnal ICMES* 1, no. 1 (May 15, 2018): 83–98. <https://doi.org/10.35748/JURNALICMES.V1I1.5>.
- John J. Mearsheimer. "Structural Realism." *Realism and International Relations*, no. Oxford University Press (2013): 355-C12.P88. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197645024.003.0012>.

- Kusmin, Achmad Fauzi, Danar Hafidz Adi Wardhana, Muhammad Sajidin, Dewi Nuraliah, Nurfadilah Nasiruddin, and Rezky Ramadhan Antuli. "Keterlibatan Amerika Serikat Dalam Konflik Suriah Sebagai Konsekuensi Dari Politik Engtangling Alliance." *Jurnal Arajang* 6, no. 1 (2023): 22–38.
- NYE, JOSEPH S. "Soft Power and American Foreign Policy." *Political Science Quarterly* 119, no. 2 (June 1, 2004): 255–70. <https://doi.org/10.2307/20202345>.
- O'hanlon, Michael. "American Force: Dangers, Delusions, and Dilemmas in National Security by Richard K. Betts." *Political Science Quarterly*, 2012. <https://doi.org/10.1002/j.1538-165x.2012.tb01133.x>.
- Rep. Engel, Eliot L. [D-NY-16]. "H.R.31 - 116th Congress (2019-2020): Caesar Syria Civilian Protection Act of 2019," 2019.
- Rofii, Muhammad Syaroni. "Dinamika Pasca Arab Spring: Membaca Pola "Proxy War" Di Suriah Dan Kawasan Timur Tengah." *Dinamika Global: Jurnal Hubungan Internasional* 4, no. 2 (2019): 283–302.
- Safitri, Syarif Bahaudin Mudore; Nurlaila. "Dinamika Perang Suriah: Aktor Dan Kepentingan." *Jrnal Kajian Politik Islam Vol.2 No.2*, no. Juli-Desember (2019)
- Suhartini, Ria. 2022. "Mendalami Peran Dan Kepentingan Aktor-Aktor Dalam Konflik Di Suriah." *Jurnal Alternatif* 2 36-49.
- Soebroto, Muhammad Maharani. "Intervensi Militer Serikat Di Suriah Era Donald Trump," 2019. <http://repository.unej.ac.id/>.
- Syuryansyah. "Intervensi Militer Amerika Serikat Dalam Konflik Politik Di Suriah Tahun 2011" 09, no. 2 (2023): 786.
- Trimulya, Andhika Bayu. "Intervensi Amerika Serikat Di Suriah (United State of America Intervention in Syria)." *Digital Repository Universitas Jember*, 2021.